

POTENSI OPINI PUBLIK TERHADAP EKSISTENSI ORMAS & PARTAI ISLAM

Neni Yulianita ^{}**

Abstrak

Dalam konteks komunikasi, terlebih-lebih dalam komunikasi politik pengkajian opini publik merupakan hal yang essensi, karena perkembangan politik atau naik-turunnya seseorang/suatu golongan/suatu organisasi yang bergerak dalam kegiatan ORMAS dan Partai Politik banyak ditentukan oleh baik-buruknya opini publik atau citra publik terhadap ORMAS dan Partai.

Dalam konteks pembentukan ORMAS dan Partai Islam tidak mungkin dapat terbentuk tanpa dukungan opini publik. Jika dukungan opini publik ini kuat maka terbentuknya ORMAS dan Partai Islam akan memenuhi harapan. Saat kemunculan partai-partai di Indonesia untuk kepentingan PEMILU tahun 1999, harus memenuhi syarat didukung sekurang-kurangnya sebanyak 10 wilayah untuk pengurus DT.I dan 10 wilayah untuk pengurus DT.II). Fenomena ini menjadi bukti potensi opini publik bagi syarat partai diperhitungkan dalam PEMILU, begitu juga berlaku bagi partai Islam.

Bagaimanapun bentuknya, opini publik dapat menimbulkan efek, baik efek yang sifatnya mendukung maupun menolak seseorang/organisasi/partai. Karena itu, tidaklah heran jika banyak penguasa, terutama di negara-negara demokrasi sangat memperhatikan proses perkembangan opini publik, dan sejauh mungkin berusaha untuk mengendalikannya.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Efek Komunikasi, dan Potensi Opini Publik

^{**} Dr. Hj. Neni Yulianita, Dra., MS., adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA

1 Pendahuluan

Amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh kepada yang baik dan mencegah/melarang yang munkar) merupakan *statement* yang perlu ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentunya diperlukan seseorang/sekelompok orang/organisasi yang dapat bertindak menegakkan kebenaran untuk menjaga kelurusan dan kepentingan bersama demi kemaslahatan umat. “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil*” (QS. Almaidah: 8). “*Orang-orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang-orang yang membenarkannya adalah mereka itu orang-orang yang taqwa*” (QS. Az-Zumar: 33).

Untuk mengkaji topik pada makalah ini, dan merujuk pada ayat-ayat di atas, maka penulis akan mengingatkan kembali sejarah singkat gerakan umat Islam di Indonesia dalam upaya menyebarkan pengaruhnya apakah itu melalui ORMAS ataupun Partai Islam untuk meluruskan dan membina kepentingan bersama demi penegakan kebenaran di muka bumi (khususnya di Indonesia).

Pada masa menjelang merdeka, seperti juga kini “umat Islam merupakan mayoritas (90%) penduduk negara Indonesia” (Biro Pusat Statistik, 1905-1982), walaupun tidak semuanya berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Namun demikian, untuk upaya penegakan kebenaran di kalangan Islam sejarah telah membuktikan bahwa pada tahun 1911 Sarekat Dagang Islam berdiri, kemudian menjadi Sarekat Islam 1912 yang dapat menyebarkan pengaruhnya ke segenap penjuru Tanah Air dari lapisan bawah sampai ke lapisan atas, karena didorong oleh rasa seagama.

Kata *Islam* pada waktu itu merupakan kata pemersatu bagi orang Indonesia. Perasaan bersatu seperti yang dijumpai pada kalangan Islam itu berkembang terus walaupun perbedaan suku serta tingkat loyalitas politik juga tampak (jauh sebelumnya dalam peristiwa Sentot Alibasah tahun 1830-an untuk menghancurkan gerakan Paderi, namun berbalik arah malah justru memperkuat golongan Islam karena rasa seiman dan keterikatan batin yang amat kuat). Dengan demikian selain persatuan ternyata perpecahan telah terjadi di antara umat Islam di tahun 1911-an. Kalangan netral agama (walaupun beragama Islam) menentang kepemimpinan mereka yang berorientasi Islam (Alimin dari Sarekat Islam yang kemudian menjadi komunis pada tahun 1916) dan berusaha mengubah singkatan SI menjadi “Sarekat Idjo” yang tidak menggunakan Islam sebagai dasar tujuan. Pada

waktu itu golongan komunis berusaha keras mengambil alih kepemimpinan Sarekat Islam, namun gagal dan akhirnya mereka membentuk Sarekat Rakyat di dalam lingkungan Sarekat Islam yang kemudian mendirikan Perserikatan Komunis Indonesia. Akhirnya, ia dikeluarkan dari Sarekat Islam.

Fenomena di atas merupakan tantangan bagi kepemimpinan SI, apalagi perkembangan berikutnya harus bersaing dengan gerakan netral agama (nasionalis) yang telah membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI), dilanjutkan dengan Partai Indonesia (Partindo) tahun 1930, Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan Partai Indonesia Raya (Parindra). Maka berkembanglah perpecahan di kalangan umat Islam, mulanya dengan komunis (masih beragama Islam) kemudian dengan nasionalis yang netral agama (sebagian beragama Islam). Gerakan menentang SI di kalangan netral agama, umumnya mereka ingin menunjukkan keterbelakangan ajaran Islam yang dicerminkan pada poligami yang dianggap merendahkan kedudukan wanita. Mereka umumnya berpendidikan Barat dan terpesona dengan pustaka Barat, yang memuat antara lain uraian-uraian negatif tentang Islam (mis: masalah pendidikan, kebersihan, kesehatan, dan sebagainya).

Ditantang oleh keadaan, dimana ajaran Barat banyak menguasai dunia, kalangan Islam yang menekuni agamanya berusaha mempertahankan diri yang pada waktu itu diprakarsai oleh Haji Agus Salim dan Haji Oemar Said, Tjokroaminoto, yang secara tegas mereka mengemukakan bahwa Islam itu modern, ajaran Islam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh karenanya mereka menolak kalangan nasionalis yang netral agama serta kalangan komunis yang mempunyai opini bahwa kalangan Islam ketinggalan zaman.

Dari situlah kemudian memunculkan gerakan-gerakan modern Islam yang sejalan dengan Sarekat Dagang Islam tahun 1911 (kemudian menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 oleh Ki Haji Samanhudi), seperti: Muhammadiyah (1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan) yang melakukan kegiatannya dengan bijak tanpa mengundang perlawanan keras terhadap lawan, dimana dari gerakan mereka banyak memunculkan propagandis terlatih untuk mengembangkan pengaruhnya apakah itu melalui tablig, tulisan di surat kabar, majalah, buku, brosur, dan lain-lain untuk memperkenalkan pandangan-pandangan Islam yang bersifat modern, melalui teknik komunikasi yang bersifat informatif, edukatif, dan persuasif. Pada era berikutnya muncul Persatuan

Islam/Persis (1923), yang bersifat keras terhadap ajaran Islam dan pengaruhnya sampai ke negara Malaysia, Muangthai diprakarsai oleh Ahmad Hassan. Kemudian diikuti muridnya, Muhammad Natsir, yang juga sebagai pengikut Haji Agus Salim (berpendidikan Barat).

Ternyata perjalanan gerakan Islam modernis tidaklah mulus, karena pada tahun 1926 muncul Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) tahun 1930 yang memperkuat diri sebagai golongan tradisional Islam menentang gerakan modernis Islam. Namun perkembangan selanjutnya akhirnya mereka meniru kalangan pembaharu, baik dalam mendirikan organisasi maupun melancarkan kegiatan. Akhirnya pada organisasi-organisasi Islam tumbuh saling pengertian diantara perbedaan-perbedaan (dalam *furu'*/cabang bukan dalam *usul*/pokok), diantara mereka menganggap perlu melakukan pendekatan sesama. Maka pada tahun 1935 berdirilah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) tempat berkumpul organisasi-organisasi Islam yang mulanya 7 organisasi pada tahun 1935 dan meningkat menjadi 21 organisasi pada tahun 1941. Melalui kekuatan MIAI inilah ditekankan pada GAPI (Gabungan Politik Indonesia) bahwa:

1. Kepala negara Indonesia harus beragama Islam,
2. Dua pertiga kabinet harus terdiri dari orang-orang Islam,
3. Suatu departemen agama hendaklah didirikan (Deliah Noer, 2000: 39-40).

Tuntutan-tuntutan ini sudah menjadi kenyataan kecuali harapannya akan bendera merah putih disisipi lambang bulan sabit dan bintang tidak tercapai. Namun demikian kekuatan dari organisasi Islam dapat kita amati dan rasakan hingga kini.

Ternyata pada periode selanjutnya kalangan Islam mengalami kekecewaan ketika pada Agustus 1945, semua tuntutan mereka dibatalkan, antara lain:

1. Dari kalangan Islam hanya dua orang yang duduk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan (Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Wahid Hasjim kedua merupakan pemimpin tangguh dan juru bicara yang kuat tentang ideologi Islam yaitu perwakilan dari Muhammadiyah dan NU),
2. Kata-kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dihapus dari mukaddimah konstitusi,

3. Kata Allah sebagai pengganti Tuhan tidak dikabulkan (karena adanya usul dari I Gusti Ktut Pudja dari Bali) (Deliah Noer, 2000: 39-40).

Walaupun dalam bidang sosial mereka dapat bersatu, namun dalam bidang politik kalangan Islam tidak berhasil bersatu. Pada tahun 1938 berdiri Partai Islam Indonesia yang antara lain didukung Muhammadiyah dan Persatuan Islam, dimana mereka merasa kecewa terhadap Sarekat Islam (pemimpin SI sendiri pecah Agus Salim sebagai pendiri dipecat dari partai tahun 1936 oleh Abikusno, dan pada tahun 1953 Abikusno juga dipecat dari partai). Pada tahun 1942 MIAI diubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), namun partai ini mendapatkan hambatan dalam gerakannya, dan pada tahun 1960 Masyumi bubar atas perintah Sukarno.

Selanjutnya, fenomena turun-naiknya gerakan ORMAS dan Partai Islam dapat kita ikuti, perjalanan mereka kadang mulus, kadang tersendat, kadang bersatu, kadang terpecah, kadang kuat, dan kadang lemah begitu seterusnya. Proses ini mengalir mengikuti keinginan dan kepentingan para pengelolanya yang konsistensinya juga turun naik mengikuti arus permainan politik sebagai suatu ciri khas ORMAS dan partai.

Namun demikian sejarah membuktikan keuletan mereka memperjuangkan kelompoknya, sehingga kita sekarang menyaksikan bahwa kompetensi mereka menjadi kenyataan dengan terangkatnya Abdurrahman Wahid dari NU yang merupakan partai Islam terbesar selain PSII dan Perti setelah bubarnya Masyumi. Untuk itu pada makalah ini, penulis akan mengkajinya dari perspektif komunikasi khususnya berkaitan dengan potensi opini publik terhadap eksistensi ORMAS dan Partai Islam.

2 Opini Publik Dalam Kegiatan Komunikasi

Opini publik dalam kegiatan komunikasi merupakan salah satu efek komunikasi disamping yang lainnya adalah sikap dan perilaku. Namun demikian opini dapatlah memperlihatkan sikap seseorang, karena pada prinsipnya seperti yang dinyatakan seorang ahli komunikasi bahwa opini adalah sikap yang diekspresikan secara verbal, sedangkan perilaku adalah sikap yang diekspresikan secara nonverbal.

Dalam konteks komunikasi, terlebih-lebih dalam komunikasi politik, pengkajian opini publik merupakan hal yang essensi, karena perkembangan politik atau naik-turunnya seseorang/suatu golongan/suatu organisasi yang

bergerak dalam kegiatan ORMAS dan Partai Politik banyak ditentukan oleh baik-buruknya opini publik atau citra publik terhadap ORMAS dan Partai Islam tersebut.

Berkenaan dengan pentingnya opini publik sebagai efek komunikasi yang harus diperhatikan dalam rangka suksesnya komunikasi, maka dalam melancarkan komunikasi seorang komunikator harus mempertimbangkan berbagai aspek yang memungkinkan gagal atau suksesnya komunikasi yang dilancarkan. Pertimbangan tersebut khususnya dalam membentuk opini publik yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun untuk membentuk opini publik agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang komunikator tidaklah mudah, ia harus melalui proses yang tidak sederhana, dan memerlukan syarat-syarat tertentu.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya opini publik agar sesuai dengan apa yang diharapkan, salah satu faktor yang terpenting adalah bahwa karakteristik dari opini publik itu sendiri yang mudah berubah dan diubah. Disinilah seorang komunikator harus tajam dalam mengamati gejala yang dapat menggagalkan komunikasi, khususnya dalam mengendalikan kemungkinan adanya pengaruh dari pihak lain yang bersifat kontra komunikasi.

Seperti dinyatakan di muka bahwa opini publik merupakan komponen efek dalam kegiatan komunikasi. Ini berarti komunikasi dapat mempengaruhi opini publik. Namun apa yang sering dilupakan adalah opini publik juga dapat mempengaruhi komunikasi. Hal ini dapat diketahui misalnya dari hasil penelitian Bernard Berelson yang menyatakan bahwa: “Antara komunikasi dan opini publik itu saling pengaruh mempengaruhi” (Berelson, dalam Palapah, 1984: 6). Hasil penelitian tersebut dapatlah diartikan bahwa: komunikasi dapat mempengaruhi opini publik, dan sebaliknya, opini publik pun dapat mempengaruhi komunikasi. Dikatakan oleh Berelson, bahwa efek dalam bentuk opini publik pertama-tama adalah melalui penyesuaian isi komunikasi dengan opini *audience* yang dominan, dan opini *audience* yang dominan mengenai suatu *issue*, secara umum disebut “Opini Publik”.

3 Potensi Opini Publik Dalam Pembentukan Ormas Dan Partai Islam

Potensi opini publik bagi para pelaku komunikasi merupakan salah satu aspek yang paling banyak menentukan suksesnya komunikasi.

Mengenai hal ini berbagai sarjana komunikasi telah mengakui bahwa potensi opini publik merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam berlangsungnya proses komunikasi.

Sebelum mengkaji potensi opini publik terhadap pembentukan ORMAS dan Partai Islam, berikut dikutip mengenai ciri-ciri yang esensi dari opini publik yaitu:

1. Opini publik selalu diketahui dari pernyataan-pernyataannya
2. Opini publik merupakan sintesa atau kesatuan dari banyaknya pendapat
3. Opini publik mempunyai pendukung dalam jumlah besar (Sunarjo, 1997: 24)

Prinsipnya, opini dapat dinyatakan secara aktif atau pasif, verbal baik secara terbuka dengan melalui ungkapan kata-kata yang dapat ditafsirkan dengan jelas, maupun melalui pilihan kata yang halus atau diungkapkan secara tidak langsung. Opini pun dapat dinyatakan melalui:

Perilaku, sikap tindak, mimik muka atau bahasa tubuh (*body language*) berbentuk simbol-simbol yang tertulis, berupa pakaian yang dikenakan, makna sebuah warna, misalnya: bidang politik maka warna hijau, kuning, dan merah adalah mewakili lambang-lambang OPP (Organisasi Peserta Pemilu) tertentu, dan lain sebagainya (Ruslan, 1998: 50).

Pernyataan yang timbul dari publik tersebut ditujukan pada masalah sosial. Karena itu merupakan masalah sosial, maka berarti merupakan penilaian sosial (*social judgement*), dan biasanya melalui proses diskusi yang mengandung upaya pengaruh mempengaruhi. Upaya ini dilakukan mengingat sifat dari opini publik itu mudah diubah dan berubah. Konsekuensinya, karena opini publik tersebut ditujukan pada masalah sosial yang umumnya bersifat kontroversial, maka ia akan melekat dengan kekuatan yang dibawanya, dan kekuatan ini tentunya akan membawa efek terhadap seseorang/sekelompok orang/organisasi, karena umumnya opini publik mempunyai pendukung dalam jumlah besar yang dapat mempunyai kekuatan.

Jika kita amati, opini publik itu tidak dapat dilihat dan ditunjuk dengan nyata bagaimana sebenarnya, tidak seperti halnya jika kita melihat atau menunjuk suatu benda yang terlihat baik atau buruk. Namun demikian,

potensi opini publik dalam arti *kekuatannya, kemampuannya, kekuasaannya* dapat kita saksikan dengan nyata. Oleh karena itu banyak literatur yang menyebut “*opini publik itu adalah suatu kekuatan yang tidak terlihat atau suatu Invisible Force*” (Bogardus, dalam Palapah, 1984: 5).

Dalam konteks pembentukan ORMAS dan Partai Islam tidak mungkin dapat terbentuk tanpa dukungan opini publik, Sebagai contoh, berdirinya SI adalah atas prakarsa pencetusnya yang kemudian didukung oleh para pengikut-pengikutnya, begitu juga yang lain-lainnya seperti NU, Muhammadiyah, Persis, MIAI, Masyumi, Perti, ICMI, HMI, dan sebagainya tidak mungkin muncul tanpa adanya kekuatan dari opini publik. Untuk menyebarkan pengaruhnya pun, mereka harus mengembangkan gerakannya melalui kegiatan komunikasi apakah itu melalui tablig, surat kabar, majalah, buku, radio, brosur, dan sebagainya untuk mendapat dukungan publik pemerhati yang tentunya berupa opini (pernyataan yang mengandung dukungan bukan sebaliknya). Jika dukungan opini publik ini kuat maka terbentuknya ORMAS dan Partai Islam memenuhi harapan (Ingat saat kemunculan partai-partai di Indonesia untuk kepentingan PEMILU tahun 1999, harus memenuhi syarat didukung sekurang-kurangnya sebanyak 10 wilayah untuk pengurus DT.I dan 10 wilayah untuk pengurus DT.II). Fenomena ini merupakan bukti dari potensi opini publik bagi syarat partai untuk turut diperhitungkan dalam PEMILU, begitu juga berlaku bagi partai Islam.

Dari gambaran di atas, tidaklah heran jika banyak penguasa, terutama di negara-negara demokrasi sangat memperhatikan proses perkembangan opini publik, dan sejauh mungkin berusaha untuk mengendalikannya. Karena bagaimanapun bentuknya, opini publik itu dapat menimbulkan efek, yakni dapat berupa dukungan maupun yang sifatnya menolak seseorang/sekelompok orang/organisasi/partai.

4 Potensi Opini Publik Terhadap Eksistensi Ormas Dan Partai Islam

Dalam bahasan pertama telah disinggung bahwa opini publik dikatakan sebagai suatu kekuatan yang tidak terlihat namun efeknya dapat kita saksikan dari berbagai peristiwa nyata, yang antara lain potensi opini publik itu dapat mendukung terbentuknya suatu lembaga atau organisasi termasuk ORMAS dan Partai Islam. Ternyata jika ditelusuri lebih jauh efek dari potensi opini publik ini, dapat berupa efek positif konstruktif dan dapat pula berupa efek negatif destruktif, yang dapat menjatuhkan atau

mengangkat seseorang, suatu organisasi, suatu partai, dan sebagainya. Oleh karena itu, berikut ini penulis akan membahas mengenai efek apakah yang dapat timbul akibat adanya potensi opini publik khususnya terhadap kehidupan manusia.

Berkaitan dengan adanya istilah bahwa opini publik adalah suatu kekuatan yang tidak terlihat, marilah kita ingat kembali sejarah tentang adanya peristiwa besar yang dapat kita saksikan dengan nyata, yakni bagaimana seorang raja yang kuat, kukuh, dan didukung kekuatan keuangan yang berlimpah serta kekuatan Angkatan Perang dengan persenjataan modern seperti Syah Iran, dapat jatuh dan kemudian hancur. Begitu pula halnya dengan Presiden Marcos yang dapat jatuh dari tampuk pimpinan dan juga kemudian hancur. Kesemuanya ini hanya karena mereka tidak lagi didukung dan bahkan sudah ditantang oleh potensi opini publik. Sebaliknya, ulama yang hanya terkenal di kalangan sendiri, seperti Khomaeny, dapat diangkat dan didudukkan pada puncak kekuasaan di Iran, hanya oleh persetujuan dan dukungan opini publik.

Berkaitan dengan efek dari adanya potensi opini publik ini, penulis akan mengangkat apa yang telah dikemukakan seorang ahli komunikasi, yang menyatakan bahwa potensi opini publik bagi kehidupan manusia antara lain sebagai berikut:

1. Opini publik dapat memperkuat undang-undang/peraturan-peraturan, sebab tanpa dukungan opini publik, UU/PP itu tidak akan jalan.
2. Opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat.
3. Opini publik adalah pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial (Bogardus, dalam Oemi Abdurachman, 1993: 56).

Dari pendapat di atas, dapat dilihat bahwa efek dari potensi opini publik sangat kuat sekali, dalam arti tanpa dukungan opini publik undang-undang/peraturan-peraturan tidak ada artinya, tanpa dukungan opini publik tidak akan tercapai apa yang menjadi harapan masyarakat mengenai sesuatu hal yang diperjuangkan, dan tanpa dukungan opini publik eksistensi suatu lembaga tidak akan berjalan dengan baik, bahkan dapat menuju pada kehancuran. Sependapat dengan Bogardus, berikut dikemukakan tentang efek dari potensi opini publik, yang antara lain sebagai berikut:

1. Opini publik dapat menjadi hukuman sosial terhadap orang atau

- sekelompok orang yang terkena hukuman tersebut.
2. Opini publik sebagai pendukung bagi kelangsungan berlakunya norma sopan santun dan susila, baik antara yang muda dengan yang lebih tua maupun antara yang muda dengan sesamanya.
 3. Opini publik dapat mempertahankan eksistensi suatu lembaga atau bahkan bisa menghancurkan suatu lembaga.
 4. Opini publik dapat mempertahankan atau menghancurkan suatu kebudayaan.
 5. Opini publik dapat pula melestarikan norma-norma sosial (Sastropetro, 1987: 119-123).

Pernyataan di atas, jelas menunjukkan bahwa efek dari potensi opini publik terhadap kehidupan manusia itu pasti ada, dan tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang, sekelompok orang, suatu lembaga, organisasi, partai, dan sebagainya. Berkaitan dengan efek di atas penulis akan mengambil contoh misalnya: dari apa yang dikemukakan pada butir satu, bahwa opini publik dapat menjadi hukuman sosial bagi orang yang terkena hukuman. Mengenai hal ini dapat kita saksikan bagaimana menderitanya Presiden Marcos di pengasingan, atau betapa malunya Gorbachev pada dunia saat digulingkan, walaupun dalam waktu tiga hari ia terangkat kembali atas dukungan opini publik, juga kasus Tommy anak bungsu Suharto, serta masih banyak lagi efek yang dapat timbul dari potensi opini publik ini.

Dari gambaran di atas maka efek negatif yang dapat timbul dari potensi opini publik tersebut dapat berupa: rasa malu, rasa dikucilkan, rasa dijauhi, rasa rendah diri, rasa tak berarti lagi dalam masyarakat, rasa frustrasi, dan sebagainya. Dengan adanya efek sebagai konsekuensi adanya potensi opini publik seperti yang telah diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa opini publik ini dapat berpengaruh, dan untuk itu para pelaku komunikasi pun harus mempunyai perhatian khusus terhadap efek ini, khususnya dalam upaya merencanakan komunikasi yang akan dilancarkan.

Dalam konteks mempertahankan eksistensi ORMAS dan Partai Islam, maka jika dikaji dari potensi opini publik yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa efek dari potensi opini publik terhadap eksistensi ORMAS dan Partai Islam sangatlah kuat sekali, sebagai contoh: kita bisa lihat bahwa eksistensi Partai Islam juga pemimpinnya tidak bisa dipertahankan atau runtuh bahkan

bisa bubar jika tidak didukung oleh kekuatan opini publik. Sebagai contoh: dipecatnya Agus Salim di tubuh Sarekat Islam pada tahun 1936 oleh Abikusno (yang didukung pengikutnya), begitu juga pemecatan Abikusno dari Partai Sarekat Islam pada tahun 1953, ini menandakan tidak dapat dipertahankannya eksistensi pimpinan partai tanpa potensi opini publik yang memihaknya. Begitu juga bubarnya Partai Masyumi pada tahun 1960, juga merupakan indikator tidak dapat dipertahankannya Partai Islam di Indonesia.

Contoh kasus lain yang pasti dicatat dalam sejarah mengenai tergulingnya Suharto (Partai Golkar), namun kita pun melihat bahwa eksistensi Partai Golkar sudah dapat dipertahankan selama kurang lebih 30-32 tahun. Berbagai permasalahan akan eksistensi Abdurahman Wahid (dari Partai Kebangkitan Bangsa yang bernuansa Islam-NU), ternyata eksistensinya tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau terguling sebelum waktunya. Dari fenomena ini, ternyata untuk mempertahankan eksistensi seorang presiden agar didukung oleh kekuatan opini publik tidaklah mudah walaupun harus mengeluarkan dollar yang tidak sedikit untuk menyewa *Consultant Public Relations*.

Fenomena di atas adalah suatu bukti bahwa kekuasaan adalah amanah, *“Allah memberinya kepada siapa yang Dia kehendaki, mencabutnya dari siapa yang Dia kehendaki, memuliakan siapa yang Dia kehendaki, menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Pada-Nya segala kebaikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu”* (QS. Ali’Imran: 26).

5 Kesimpulan

- 1) Opini Publik merupakan efek komunikasi yang dapat menentukan sukses gagalnya komunikasi yang dilancarkan seseorang/sekelompok orang/organisasi dalam mempertahankan eksistensinya.
- 2) Dalam pembentukan ORMAS dan Partai Islam sangatlah bersandar pada dukungan Opini Publik. Oleh karena itu opini publik perlu mendapat perhatian khusus oleh para pelaku komunikasi ORMAS dan Partai Islam dalam melancarkan kegiatan komunikasinya pada saat mencari dukungan publik.
- 3) Potensi opini publik sangat menentukan eksistensi ORMAS dan Partai Islam dalam mengembangkan sayapnya di dunia politik, oleh karena itu para pengelola ORMAS dan Partai Islam harus paham manajemen

komunikasi politik, agar pendukung ORMAS dan Partai Islam tetap setia, loyal, dan bersedia mempertahankan eksistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Oemi. 1993. *Dasar-Dasar Public Relations*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Blake, Reed H., and Edwin O. Haroldsen. 1979. *A Taxonomy of Concepts in Communication*. Hasting.House, New York.
- Noer, Deliar. 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Mizan. Bandung.
- Palapah, M.O. 1984. *Diktat*. Opini Publik. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Roekomy, R. 1967. *Makalah*. Opini Publik (Ciri-ciri, Konsep, dan Pengukurannya). Bandung.
- Ruslan, Rosady. 1998. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasinya)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sastropetro, R.A. Santoso. 1987. *Komunikasi Sosial (Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak)*. Remadja Karya, Bandung.
- Sunarjo, Djoenaesih S. 1997. *Opini Publik*. Liberty, Yogyakarta.